

### **BAB III**

#### **HASIL DAN ANALISIS**

##### **A. Gerakan Sosial Politik Organisasi DPD FPI Sumatera Selatan**

Gerakan Sosial Politik Gerakan Sosial dan khususnya Gerakan Sosial Islam, baik yang lahir sebelum kemerdekaan di Indonesia maupun pasca reformasi memiliki kepedulian yang sama, yaitu membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Dalam memperjuangkan dimensi masyarakat tersebut, Gerakan Sosial Islam, tidak bisa steril dari aspek-aspek politik dan bahkan Gerakan-Gerakan Sosial Islam awal di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sejarah “politik” Indonesia, meski tidak selalu dikaitkan secara langsung dengan aktivitas politik, karena memang Gerakan Sosial Islam bukanlah Gerakan Politik dan Agama yang dipahaminya adalah bukan Agama Politik. Meskipun demikian kiprah dan peran-perannya dalam kehidupan kebangsaan telah memberikan warna politik, tanpa memperdebatkan kapasitas dan modal politik yang digunakan untuk terlibat dalam proses politik. Gerakan Sosial biasanya berkembang sesuai dengan kecenderungan orientasi pembangunan dan modernisasi dalam suatu Negara.<sup>1</sup>

Di Indonesia itu sendiri Eksistensi Agama dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD sangat dihargai. Baik sebelum maupun sesudah Amandemen UUD 1945. Dalam kehidupan keagamaan masyarakat di Indonesia banyak dijumpai organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan) yang didirikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Jurdi. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia

peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) umumnya dan organisasi keagamaan pada khususnya di Indonesia didukung oleh konstitusi UUD 1945 dan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah sangat mendukung keberadaan organisasi kemasyarakatan, yang melaluinya masyarakat dapat ikut sertakan secara aktif dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan UUD 1945.

Dalam buku Mutiara Perjuangan Imam Besar Al Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc Ma Dpmss yang disusun oleh Ustad Muhammad Syahid Joban Lc menyatakan bahwa penerapan Syari'at Islam dibawah naungan NKRI, Indonesia tidak perlu jadi Saudi atau Iran, tapi Indonesia wajib menjadi Negara Islam dengan ciri ke Indonesiaan yang khas. Maksudnya, kewajiban pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dibawah naungan NKRI, sebagaimana Amanat Piagam Jakarta 22 Juni 1945.<sup>2</sup> Soal minoritas, justru akan dilindungi dengan Syariat Islam. Mereka bebas mendapatkan hak Agama, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Budaya, Hukum dan Politiknya. Mana ada ajaran dan Agama apa pun didunia yang memiliki konsep toleransi dan perlindungan terhadap minoritas sehebat dan sesempurna yang dimiliki Syariat Islam.<sup>3</sup>

Front Pembela Islam (FPI) merupakan sebuah Organisasi Islam yang hadir ditengah masyarakat Indonesia dengan menawarkan berbagai solusi dalam kondisi krisis Sosial Politik yang terjadi saat itu, terlebih lagi dimasa reformasi organisasi dan kelompok Islam mendapat momentum yang tepat untuk melaksanakan gerakannya.

---

<sup>2</sup> Al Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc Ma Dpmss, "Mutiara Perjuangan Imam Besar", Pustaka Dakwah, 2018, hlm 135

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 136

## **B. Gerakan Sosial Organisasi DPD FPI Sumatera Selatan**

FPI adalah Ormas Islam dengan Gerakan Sosial keagamaannya terlihat dari berbagai agenda dan kegiatannya yang secara aktif dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota organisasi DPD FPI Sumatera Selatan yaitu menyatakan bahwa kegiatan FPI:

*“Yang pertama, Dakwah, meliputi Rihlah, Tabliq Akbar, Tabliq Bulanan, Kajian Rutin dan hal-hal lain terkait dengan dakwah. Kedua, Kegiatan-kegiatan kemanusiaan, seperti membantu saudara kita yang tertimpa musibah dengan melakukan penggalangan dana sebagai upaya untuk membantu meringankan beban yang tertimpa musibah. Ketiga, kegiatan-kegiatan kemiliteran, dalam upaya meningkatkan kedisiplinan maka dilakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat kemiliteran. Keempat, Kegiatan keilmuan, yang bersifat akademis.”<sup>4</sup>*

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa organisasi DPD FPI Sumatera Selatan dalam hal Dakwah tidak hanya diatas mimbar saja melainkan sudut pandang Dakwah secara luas yaitu segala bentuk upaya himbauan nasihat untuk menyeru kepada kebaikan, menjauhi dan mencegah segala kemungkaran. Serta dalam hal kemanusiaan organisasi DPD FPI Sumatera Selatan rutin melakukan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan sosial seperti, dalam kegiatan kemanusiaan akhir-akhir ini membantu membagikan masker dalam menanggulangi dampak kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dalam hal kegiatan keilmuan yang bersifat akademis ialah seperti membentuk badan khusus Front Mahasiswa Islam (FMI) dan Ikatan Pelajar Front (IPF).

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Yusuf Andika, tanggal 6 Agustus 2019 di Markas FPI Sumatera Selatan

## **1. Dakwah**

Dakwah yang berarti mengajak dengan cara lembut, sopan, ramah, simpatik dan berargumentatif. Seperti dalam (QS. An nahl: 125) “*Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah*” maksudnya adalah ilmu kebaikan yang disampaikan dengan akhlakul kariimah, memberi pelajaran yang baik dan jika harus berdebat harus dilakukan dengan cara terbaik.<sup>5</sup> Karena dengan melalui Dakwah metode ceramah untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga selain dari pada informasi yang bersumber dari ajaran Agama maupun informasi terkini.

Salah satu bentuk nyata Dakwah FPI dalam tausiyah yang disampaikan oleh Habib Rizieq Syihab di Masjid Istiqlal pada Aksi Bela Agama dan Negara 112 dengan meminta kepada seluruh Umat Islam agar meningkatkan Ukhuwah Islamiyah dengan tidak bercerai berai dan mundur selangkahpun dalam memperjuangkan kalimat Allah. Habib Rizieq menuturkan bahwa aksi tersebut adalah bentuk kecintaan kepada Negara, Agama, Ulama dan kemajemukan, sehingga menepis anggapan pemerintah bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah.

---

<sup>5</sup> Al Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc Ma Dpmss, “Mutiara Perjuangan Imam Besar”, Pustaka Dakwah, 2018, hlm 31

Habib Rizieq juga menyampaikan agar Umat Islam tidak terprovokasi terkait maraknya kriminalisasi Ulama dan mengajak untuk berdialog supaya mencegah kesalahpahaman mengenai tuduhan makar dengan alasan segala bentuk aksi tidak terlepas dari koridor konstitusi yang berlaku di Negara ini.<sup>6</sup>

Adapun Dakwah yang dilakukan DPD FPI Sumatera Selatan ialah dalam gerakan ini FPI melakukan Dakwah seperti Ziarah Qubro, Tabliq Akbar, Tabliq Bulanan, Kajian Rutin. Tabliq Akbar yang dilakukan DPD FPI Sumatera Selatan ini seperti mengundang Ustad Abdul Somad, para Habaib dan Ustad kondang lainnya, acara ini dilakukan di pelataran BKB Palembang. Tabliq Bulanan yang dilakukan ini ialah Tabliq yang berkeliling setiap bulanannya di berbagai tempat di kota Palembang. Sedangkan kajian rutin yang dilakukan DPD FPI Sumatera Selatan ialah kajian yang dilakukan di markas DPD FPI Sumatera Selatan.

Jadi dari analisis saya dalam Gerakan Sosial DPD FPI Sumatera Selatan di bidang Dakwah sangat positif, yang mereka lakukan ini sangat bermanfaat dan membuat masyarakat lebih memahami tentang ajaran Syariat Islam.

## **2. Hisbah**

Adapun medan Juang Hisbah adalah upaya menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, *Amar Ma'ruf* itu berbentuk seruan dan instruksi yang tegas kepada masyarakat untuk berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan *Amar Ma'ruf* seperti komando pasukan tempur, suaranya lantang dan matanya sampai terlihat memerah.

---

<sup>6</sup> Ini Tausyiah Habib Rizieq Syihab yang Menggetarkan di Aksi 112, Negara Islam.net, 12 Februari 2017. Artikel diakses pada 30 Agustus 2019 dari <https://negaraislam.net/ini-tausiyahhabib-rizieq-shihab-yang-menggetarkan-di-aksi-112>

Mengajak anak Sholat, mentradisikan mematikan televisi saat maghrib, melarang untuk merokok adalah bentuk *Amar Ma'ruf* karena itu orang tua harus memberi teladan. Jika medan Juang Dakwah diuntut bersikap lembut, *Amar Ma'ruf* bersikap tegas, sedangkan *Nahi Munkar* lebih tegas lagi. Dulu, Nabi Muhammad SAW pernah memecahkan gentong-gentong miras, meninju orang mabuk di pasar karena meresahkan warga disekitarnya, termasuk memerintahkan untuk membakar Masjid Dhiror. Masjid Dhiror yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin saja dibakar, apalagi tempat kemaksiatan yang lain. Jika Nabi hidup dimasa kini bukan tidak mungkin sarang judi, tempat pelacuran, pabrik miras, dan tempat kemaksiatan akan diperintahkan untuk dibakar.

Dalam konteks sekarang, aparat pemerintahlah yang harus tegas menutup tempat maksiat seperti itu. FPI bukan untuk mengambil atau mendahului wewenang pemerintah dan aparat kepolisian, tapi mendorong pemerintah untuk menengakkan Hisbah (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*). Sebagai Umat Islam, dalam menyikapi kemunkaran hendaknya jangan menjadi penonton, tapi ambil bagian untuk itu.<sup>7</sup> Selain itu ormas ini juga bergerak pada bidang sosial seperti membantu korban bencana alam. Selaku laskar penebar *Amar Ma'ruf*, ormas ini tetap akan melakukan pencegahan yang *Munkar*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Al Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc Ma Dpmss, "Mutiara Perjuangan Imam Besar", Pustaka Dakwah, 2018, hlm 29-30

<sup>8</sup> Jangan Salah Ngomong, Ada Laskar Pemburu Penista Agama, Merah Putih, 07 Maret 2017. Artikel diakses pada 31 Agustus 2019 dari <http://merahputih.com/post/read/jangan-salahngomong-ada-laskar-pemburu-penista-agama>

Jadi dari analisis saya Gerakan Sosial DPD FPI Sumatera Selatan dalam bidang Hisbah ini sangat baik, walaupun dalam gerakan Hisbah ini khususnya dalam gerakan *sweeping* dan sebagainya, beberapa masyarakat menganggap gerakan ini cukup buruk, tetapi pada nyatanya ketika saya terjun langsung dalam hal *sweeping* dan sejenisnya, DPD FPI Sumatera Selatan sebelum melakukan tindakan selalu mengikuti Prosedur Standar Aksi FPI, bukan semata-mata langsung melakukan tindakan yang berujung anarkis.

### **3. Jihad**

Kemudian yang dimaksud Jihad adalah berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan mendapatkan ridhonya. Jihad memang dikatakan keras, ada darah yang tumpah, ada nyawa yang melayang. Dan Jihad itu berat, ada syarat dan rukunnya, ada etikanya, ada akhlak dan adab yang harus diperhatikan. Seperti tidak membunuh wanita, anak-anak, tokoh Agama dan warga sipil yang tidak bersenjata.<sup>9</sup> Jihad yang selama ini dilakukan FPI adalah bagaimana menegakkan keadilan seperti pada kasus poso yang dilakukan oleh kalangan non muslim yang dengan tujuan melakukan genosida kepada Umat Islam. Pada kasus Poso ini DPD FPI Sumatera Selatan hanya ikut membantu korban. Belum pada Jihad yang memang untuk pengerahan massa sebagaimana Jihad berdarah yang telah dilalui oleh para Rasulullah SAW.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Al Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc Ma Dpmss, "Mutiara Perjuangan Imam Besar", Pustaka Dakwah, 2018, hlm 30

<sup>10</sup> Muhammad Hijri Prakarsa. Pemikiran Front Pembela Islam (FPI) tentang Hubungan Islam dan Negara: Studi terhadap FPI di Indonesia. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017

Dalam mengambil sebuah keputusan, FPI menggunakan pola kekuasaan dengan pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Musyawarah adalah mekanisme yang dianggap tepat karena sesuai dengan Syariat Islam seperti yang tercantum pada Firman Allah SWT: “*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*”. (QS. Al-Shura 42: 38).

Mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah juga ditegaskan oleh Ustadz Jaqfar Shodiq, yang mengatakan: Kita (FPI) ada musyawarah nasional, 5 tahun sekali, Mukernas (*musyawarah kerja nasional*) itu 1 tahun sekali, di tingkat DPD ada Muscab (*musyawarah cabang*), Musda dan sebagainya, karena kita ada DPP, DPD, DPC, sampai ketingkat lurah. Mengapa kita lebih memilih musyawarah karena kita tidak membenarkan proses Demokrasi. Jadi pemilihan dan keputusan hanya pada sampai tingkat musyawarah tanpa adanya pemungutan suara.

Sejauh ini mekanisme pemilihan hanya sampai pada musyawarah, lain halnya dengan organisasi lain yang menggunakan voting atau pemungutan suara. FPI tidak menjunjung Demokrasi bahkan secara Negara pun tidak mengenal kata Demokrasi. Seperti halnya Indonesia, menurut FPI Negara Indonesia berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti yang tercantum pada Pancasila Sila ke 4.

Dalam bermusyawarah tidak diperkenankan menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal karena musyawarah itu proses untuk menemukan jalan mufakat dengan mencari kesepakatan bersama. Lain halnya dengan voting yang dinilai sangat berbahaya karena keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak, dalam Islam ada ayat dinamakan Asyuro yang mengatakan bahwa musyawarah itu bagian dari pada Al- Quran. Di FPI terdapat Majelis Syura sebagai dewan pertimbangan Syura.<sup>11</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh FPI tidak terlepas dari ideologi organisasinya, pada akhirnya terbentuk dan tindakan FPI tidak terlepas dari ide atau gagasan para Ulama (founding fathers) yang merujuk pada Al-Quran dan Hadist sehingga merepresentasikan ideologinya secara kolektif dalam bentuk organisasi kemasyarakatan. Tidak lengkap ideologi hanya menyatukan sekumpulan orang dalam organisasi tanpa adanya tindakan, aktivitas FPI didasari sebagaimana ideologi yang tertuang sehingga membentuk karakter organisasi sesuai dengan tujuan awal terbentuknya.

Jika dilihat dalam Gerakan Sosial di dalam Organisasi FPI jika dikaitkan dengan Teori Charles Tilly dianggap sesuai dengan Gerakan FPI di Indonesia, secara khusus di Sumatera Selatan dengan berbagai isu serta permasalahan yang menekan masyarakat dan dianggap melenceng dari koridor yang seharusnya dalam hal ini pandangan FPI tentang penegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam melindungi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. FPI mampu menunjukkan Gerakan Sosial yang dibentuk dari berbagai aksi dan tindakannya menjadi sebuah Gerakan Politik. Dimana dalam Teori Tilly juga menegaskan bahwa Gerakan Sosial menjadi kendaraan oleh orang-orang atau kelompok untuk menunjukkan atau tampil di publik politik.

---

<sup>11</sup> Muhammad Hijri Prakarsa. *Pemikiran Front Pembela Islam (FPI) tentang Hubungan Islam dan Negara: Studi terhadap FPI di Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017

## C. Gerakan Politik DPD FPI Sumatera Selatan

### 1. Hisbah

Hisbah berarti *Amar Ma'Ruf Nahi Munkar*, medan juang ini harus dengan ketegasan. Dalam Hadits Ibnu Majah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah berdiri dihadapan sahabat menjelaskan mana Haq dan Bathil, wajah Nabi pun memerah, suaranya lantang, Nabi dengan tegas bagaikan komandan pasukan tempur. Keterangan lain dari *Al Imam at Tiba'i*, dijelaskan bahwa sifat Nabi Muhammad SAW mudah memaafkan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pribadi, akan tetapi apabila hak Allah SWT dilanggar, hukum Allah dilanggar, Agama Allah dinistakan, maka tidak ada seorangpun yang bisa mencegah ketegasan Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup>

Dalam hal ini FPI menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dengan mengikuti aturan main yang disepakati oleh masyarakat tanpa melanggar konstitusi sehingga sifatnya prosedural. Bentuk Hisbah yang dilakukan oleh FPI merupakan medan juang dengan ketegasannya yang dibuktikan melalui pembentukan laskar FPI untuk melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* seperti pada kasus unjuk rasa Anti Calon Gubernur DKI Jakarta "Basuki Tjahaya Purnama" di Gedung Kementrian Pertanian, Jakarta Selatan. Sekelompok orang yang menamai diri sebagai Laskar Pemburu Penista Agama, merupakan sekelompok pemuda yang fokus mengawal sidang kasus tersebut dengan tujuan

---

<sup>12</sup> Muhammad Hijri Prakarsa. *Pemikiran Front Pembela Islam (FPI) tentang Hubungan Islam dan Negara: Studi terhadap FPI di Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017

menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Selaku laskar penebar *Amar Ma'ruf*, ormas ini tetap akan melakukan pencegahan yang *Munkar*.<sup>13</sup>

Gerakan Politik DPD FPI Sumatera Selatan sudah sejak lama melakukan gerakan yang mencolok seperti salah satu gerakannya saat itu ialah menolak Ahmadiyah di Sumatera Selatan, seperti yang di dapat dalam wawancara ke markas DPD FPI Sumatera Selatan yaitu:

*“Waktu pertama kali Aliran Ahmadiyah masuk ke kota Palembang, FPI pertama kali yang melarang aliran Ahmadiyah masuk. Bekerjasama dengan Gubernur Sumatera Selatan, pada saat itu Plt Gubernurnya Prof. Dr. H. Mahyuddin N. S.”*<sup>14</sup>

Adapun juga Gerakan Politik DPD FPI Sumatera Selatan yang menolak kontingen Myanmar ikut Asian Games<sup>15</sup> menolak kedatangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas.<sup>16</sup> dan mempertahankan beberapa UU, Seperti yang dikatakan oleh Kgs. Muhammad Darmansyah, ia menyatakan bahwa:

*“Dalam DPD FPI Sumatera Selatan mempertahankan UU tentang Penistaan agama, mempertahankan UU tentang minuman beralkohol. Bahkan saat ada yang ingin membuat UU melegalkan LGBT, Alhamdulillah sudah kita lawan dan akhirnya UU tersebut tidak jadi.”*<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Jangan Salah Ngomong, Ada Laskar Pemburu Penista Agama, Merah Putih, 07 Maret 2017. Artikel diakses pada 31 Agustus 2019 dari <http://merahputih.com/post/read/jangan-salahngomong-ada-laskar-pemburu-penista-agama>

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kgs. Muhammad Darmansyah tanggal 6 Agustus 2019 di Markas FPI Sumatera Selatan

<sup>15</sup> MERDEKA : “PERISTIWA” <https://www.merdeka.com/peristiwa/fpi-sumsel-tolak-kontingen-myanmar-ikut-asian-games.html> diakses tanggal : 2 Desember 2018

<sup>16</sup> HIDAYATULLAH: <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/10/06/152169/ormas-islam-sumsel-tolak-kedatangan-ketum-gp-ansor.html> diakses tanggal : 2 Desember 2018

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kgs. Muhammad Darmansyah tanggal 6 Agustus 2019 di Markas FPI Sumatera Selatan

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa organisasi DPD FPI Sumatera Selatan berperan aktif dalam memperhatikan perkembangan UU ataupun peraturan dan kebijakan yang ingin dibuat oleh pemerintah di Indonesia.

## **2. Jihad**

Jihad memiliki ruang lingkup kerja yang sangat luas, sehingga Jihad mencakup berbagai sektor perjuangan Islam, seperti Jihad Tenaga, Lisan dan Hati, Jihad Ibadah, Jihad Ilmu, Jihad Harta dan lain sebagainya. Melalui perjuangan Jihad inilah FPI merealisasikan perjuangannya yang berpegang teguh terhadap syariat Islam. Untuk memperjuangkan Syariat Islam, FPI juga bertekad bulat mendesak MPR agar mengamandemen konstitusi dan memberlakukan Syariat Islam, salah satunya tuntutan FPI kepada MPR/DPR untuk mengembalikan tujuh kata Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya ke dalam UUD 1945. Keyakinan FPI akan krisis multidimensional yang melanda di Indonesia akan berakhir apabila Syariat Islam dapat diberlakukan.<sup>18</sup> Perjuangan inilah yang menjadi bagian dari pada bentuk Jihad FPI di Indonesia. Sedangkan DPD FPI Sumatera Selatan, Jihad yang dilakukannya ialah pada saat ikut Aksi 212 tahun 2016 dan baru-baru ini ikut Reuni 212 tahun 2019.

Sementara pedoman organisasi FPI sebagaimana termaktub dalam AD/ART, disebutkan bahwa beriman kepada Allah adalah tujuan tertinggi, Nabi Muhammad adalah teladan; Al-Qur'an adalah pedoman yang tertinggi; Jihad adalah jalan hidup yang harus ditempuh; dan Syahid adalah cita-cita yang

---

<sup>18</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabero, 2004) hlm. 76

senantiasa didambakan. Atas dasar pedoman ini, lahir sebuah semboyan yang terkenal, "*Hidup Mulia Atau Mati Syahid*". Dalam kaitan ini, penting ditegaskan bahwa meski sangat menonjol melakukan razia tempat-tempat maksiat, tidak berarti FPI tidak memiliki agenda lain dalam kehidupan Sosial Dan Politik. FPI berpandangan bahwa kemaksiatan dibidang politik juga harus diberantas, meski FPI bukan organisasi politik. FPI tidak buta politik, karena bagaimana pun di era keterbukaan sekarang ini, FPI ingin mengambil peran penting dalam upaya pembangunan bangsa dengan menyadarkan segenap warga bangsa agar senantiasa sadar akan kewajiban dan hak-haknya.<sup>19</sup>

Jika dilihat dalam Gerakan Politik di dalam Organisasi DPD FPI Sumatera Selatan jika dikaitkan dengan Teori Ramlan Surbakti dianggap sesuai dengan Gerakan FPI di Indonesia, secara khusus di Sumatera Selatan. Dari Gerakan Politik ini dilihat dari Teori Perilaku Politik menurut Ramlan Surbakti yaitu kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku Politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen atau ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya. Perilaku Politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 147-148.

FPI mampu menunjukkan Gerakan Politik yang dibentuk dari berbagai aksi dan tindakannya menjadi sebuah Gerakan politik, dalam hal ini terlihat dari Aksi Bela Islam 411 dan 212 tahun 2016 yang berhasil mempengaruhi konstelasi politik Indonesia dengan ditetapkannya “Basuki Tjahaja Purnama” alias Ahok sebagai penista agama terkait Surah Al-Maidah, dan juga gerakannya yaitu menolak Ahmadiyah di Sumatera Selatan, FPI Sumatera Selatan menolak kontingen Myanmar ikut Asian Games dan menolak kedatangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor “Yaqut Cholil Qoumas”.

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi DPD FPI Sumatera Selatan, ada beberapa pendapat berbeda dari anggota FPI dalam melakukan suatu kegiatan seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota DPD FPI Sumatera Selatan yaitu :

*“tidak ada yang menghambat FPI dalam melaksanakan kegiatan, dari pemerintahan kota, provinsi, bekerjasama dengan kita dalam hal-hal. Contohnya dalam hal bulan Ramadhan, kita bekerjasama dengan pemerintahan kota Palembang untuk menutup semua diskotik-diskotik selama bulan Ramadhan itupun dipenuhi oleh pemerintah kota Palembang. Itu artinya FPI dan pemerintah sudah saling bekerjasama antara Umara dan Ulama untuk saling bekerjasama.”<sup>20</sup>*

Sedangkan menurut Yusuf :

*“Faktor dari dalam, jumlah anggota yang sedikit, lambatnya respon dari beberapa anggota mengingat manajemen waktu dari beberapa anggota yang terbilang masih belum baik. Kesibukan kegiatan yang menyebabkan benturan kegiatan. Faktor dari luar, pencekalan dari beberapa oknum yang tidak menginginkan adanya FPI.”<sup>21</sup>*

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kgs. Muhammad Darmansyah tanggal 6 Agustus 2019 di Markas FPI Sumatera Selatan

<sup>21</sup> Wawancara dengan Yusuf Andika, tanggal 6 Agustus 2019 di Markas FPI Sumatera Selatan

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa organisasi DPD FPI Sumatera Selatan sudah sejak lama menjalin hubungan baik dengan pemerintah kota Palembang. Tetapi ada beberapa faktor yang menghambat organisasi DPD FPI Sumatera Selatan dalam melakukan kegiatan seperti lambatnya respon dari beberapa anggota dan pencekalan beberapa oknum yang tidak menginginkan adanya organisasi FPI.

Banyak yang menilai bahwa organisasi FPI itu radikalisme. Saya melihat dimedia sosial ataupun di televisi, mereka condong menilai organisasi yang bermarkas pusat dipetamburan Jakarta barat ini radikalisme, inilah mengapa masyarakat awam yang tidak mengerti organisasi FPI atau hanya tahu tentang organisasi FPI dari media sosial dan pertelevisian mereka menganggap FPI itu radikalisme. Tetapi ketika saya terjun langsung kelapangan, organisasi DPD FPI Sumatera Selatan ini organisasi yang tidak buruk ataupun tidak radikalisme. Karena dapat kita lihat dari Gerakan Sosial maupun Gerakan Politiknya yang dilakukannya selalu sesuai dengan Prosedur Standar Aksi FPI.